

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai instansi pembina jabatan fungsional peneliti harus terus menerus melakukan peningkatan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tugas LIPI adalah melakukan pembinaan karir bagi peneliti. Untuk mendukung hal ini, LIPI telah mencoba fokus dalam mengembangkan sumber daya manusia maupun organisasi pendukungnya. Terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dalam lingkup organisasi PNS unsur pendidikan dan pelatihan sangat memegang peranan penting. Hal ini dimulai sejak pegawai memasuki organisasi hingga pegawai tersebut pensiun.

Dalam rangka mengimbangi organisasi pembelajar yang pesat LIPI telah mengantisipasinya dengan membentuk unit kerja baru setingkat Eselon II, yaitu Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti yang merupakan penggabungan dari Bagian Pendidikan dan Pelatihan serta Bagian Jabatan Fungsional Peneliti, yang sebelumnya di bawah Biro Organisasi dan Kepegawaian. Unit baru ini mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan jabatan fungsional peneliti baik pusat maupun daerah serta berkewajiban menciptakan peningkatan sumberdaya yang memiliki kompetensi dan profesionalisme. Pengembangan organisasi ini juga diharapkan agar SDM dapat menguasai teknologi sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

Tugas yang diemban Pusbindiklat Peneliti LIPI adalah :

1. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan, rumah tangga dan ketertiban serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
2. Melaksanakan penyusunan program, kurikulum, materi, pengkajian dan evaluasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
3. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional peneliti pusat dan daerah, serta pendidikan dan pelatihan teknis serta kedinasan bagi pegawai LIPI.



LIPI

4. Melaksanakan penyiapan bahan penilaian angka kredit, dan penetapan angka kredit serta akreditasi, penyuluhan dan informasi jabatan fungsional peneliti pusat dan daerah.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya maka program-program Pusbindiklat Peneliti LIPI dilaksanakan oleh :

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
3. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4. Bidang Penilaian dan Akreditasi.

Disamping itu, Pusbindiklat Peneliti LIPI memerlukan bantuan dan koordinasi yang baik dari unit kerja lain di lingkungan Sektama LIPI.

B. Tujuan

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusbindiklat Peneliti LIPI dalam tahun anggaran 2005 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan lainnya dimaksudkan untuk menyampaikan laporan secara rinci berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan dukungan sumber daya yang dimiliki di unit kerja dibawahnya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai informasi tentang lembaga pembinaan, pendidikan dan pelatihan di LIPI dengan kegiatan dan peran baru sehingga dapat diketahui telah menjalankan program-program dengan baik.

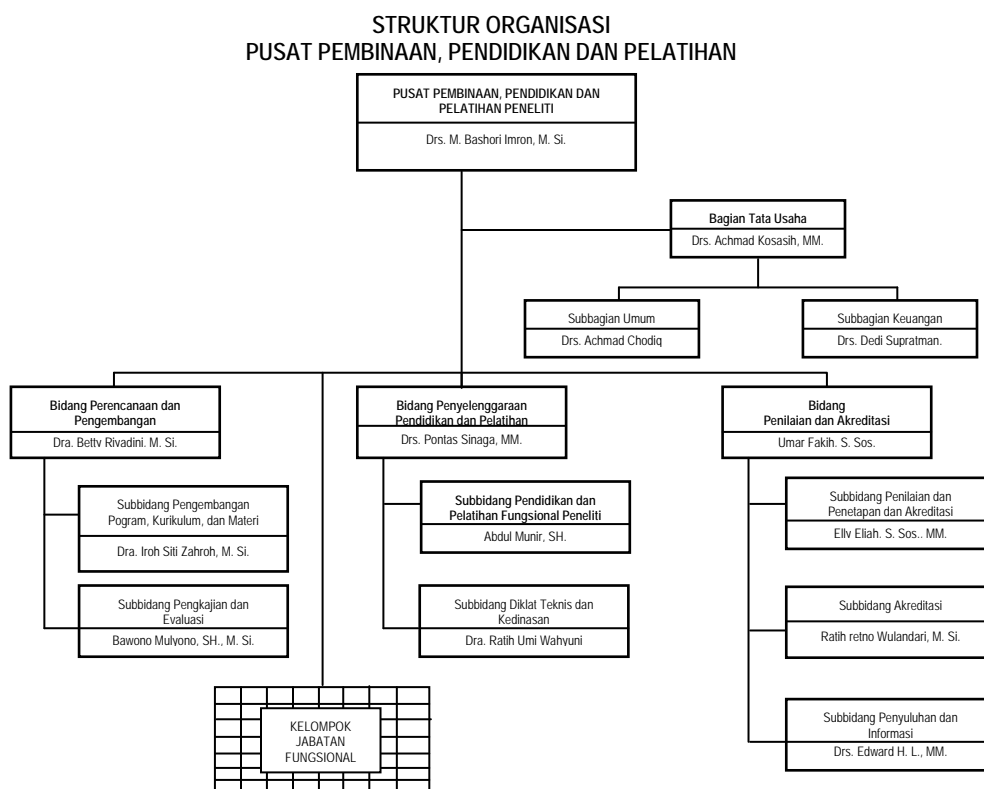


ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan SK Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004, tanggal 28 Oktober 2004, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti LIPI, terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
3. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4. Bidang Penilaian dan Akreditasi
5. Kelompok Jabatan Fungsional



B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004, Pasal 381, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti LIPI, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan jabatan fungsional peneliti, baik untuk peneliti Pusat maupun Daerah, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai LIPI, dalam rangka meningkatkan kompetensi peneliti dan kapasitas institusi penelitian dan pengembangannya di Pusat dan Daerah, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala LIPI.

2. Fungsi

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti LIPI menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan serta pendidikan dan pelatihan peneliti;
- b. Pelaksanaan akreditasi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional peneliti Pusat dan Daerah;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai LIPI dan peneliti di Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan kompetensi peneliti dan kapasitas institusi penelitian dan pengembangan;
- d. Pemantauan, akreditasi dan sertifikasi serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti serta pendidikan dan pelatihan di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
- e. Penyusunan pedoman, pembinaan dan pemberian teknis pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan peneliti;
- f. Pengelolaan informasi dan dokumen Jabatan Fungsional Peneliti serta kerja sama pendidikan dan pelatihan peneliti;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha evaluasi serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. (SK Kepala LIPI No.3212/M/2004 BAB XII, Pasal 382)

C. Visi dan Misi

1. Visi

”PRIMA DALAM PELAYANAN, UNGGUL DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENELITI”

2. Misi

- a. Membina dan mengembangkan jabatan peneliti untuk mampu menjawab tantangan pembangunan serta mampu menjadi acuan bagi fungsional lainnya.
- b. Menjalin kemitraan dan kerjasama antar instansi Departemen dan lembaga internasional, nasional dan daerah dalam menumbuhkan kesamaan persepsi penelitian dan pengembangannya.
- c. Membentuk iklim, sarana, prasarana, dan struktur kelembagaan litbang yang produktif, inovatif, kreatif, efektif, dan efisien.
- d. Mewujudkan masyarakat peneliti yang beretika dan berkarakter.
- e. Mengusahakan kompensasi bagi peningkatan kesejahteraan peneliti.
- f. Tersedianya standar peraturan-peraturan peneliti secara nasional
- g. Terlaksananya penyelenggaraan diklat peneliti secara prima dan unggul
- h. Terwujudnya diklat-diklat teknis.



D. Sumber Daya Manusia

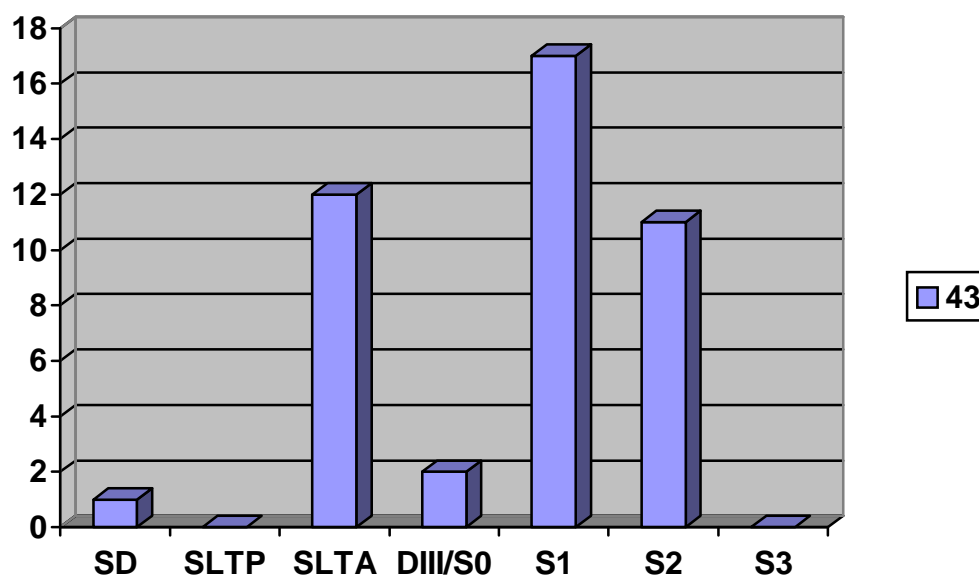
Pegawai Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti LIPI sampai dengan Desember 2005 seluruhnya 43 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.

Komposisi Pegawai Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti LIPI menurut tingkat Pendidikan Tahun 2005.

UNIT KERJA	SD	SLTP	SLTA	S0 / D III	S1	S2	S3	JUMLAH
Pusbindiklat Peneliti LIPI	-	-	-	-	-	1	-	1
Bagian Tata Usaha	1	-	4	1	2	1	-	9
Bidang Perencanaan dan Pengembangan	-	-	1	-	4	3	-	8
Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	4	-	4	1	-	9
Bidang Penilaian dan Akreditasi	-	-	3	1	4	3	-	11
Kelompok fungsional	-	-	-	-	3	2	-	5
JUMLAH	1	-	12	2	17	11	-	43

Grafik



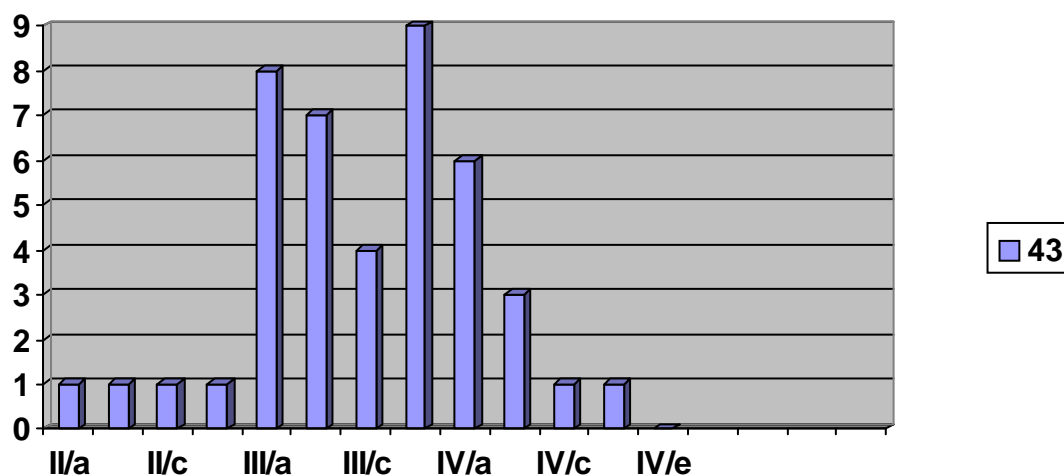


LIPI

Tabel 2.
Komposisi Pegawai Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti LIPI
menurut Pangkat/Golongan Tahun 2005.

UNIT KERJA	GOLONGAN													Jumlah
	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
Pusbindiklat Peneliti LIPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Bagian Tata Usaha	1	1	1	-	1	2	-	2	1	-	-	-	-	9
Bidang Perencanaan dan Pengembangan	-	-	-	-	2	-	1	2	2	1	-	-	-	8
Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	1	2	3	-	2	-	1	-	-	-	9
Bidang Penilaian dan Akreditasi	-	-	-	-	3	2	3	3	-	-	-	-	-	11
Kelompok fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	5
JUMLAH	1	1	1	1	8	7	4	9	6	3	1	1	-	43

Grafik



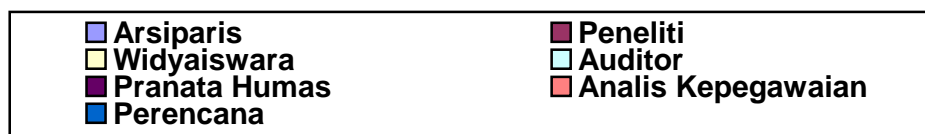
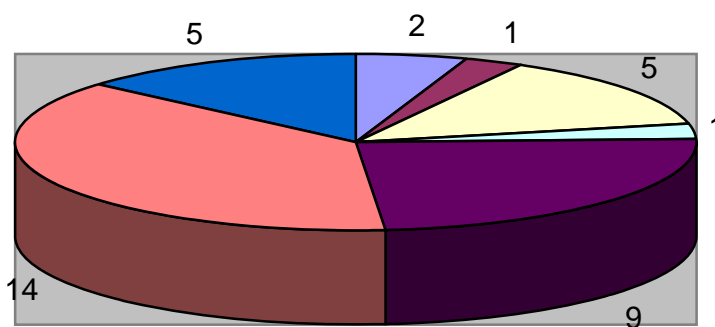


LIPI

Tabel.3
Komposisi Pegawai Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti LIPI
yang Mempunyai Jabatan Fungsional Tahun 2005.

UNIT KERJA	Arsiparis	Peneliti	Widyaiswara	Auditor	Pranata Humas	Analisis Kepeg.	Perencana	JML
Pusbindiklat Peneliti LIPI	-	1	-		-	-	-	1
Bagian Tata Usaha	1	-	-	1	2	2	-	6
Bidang Perencanaan dan Pengembangan	1	-	-	-	2	1	3	7
Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	3	4	1	8
Bidang Penilaian dan Akreditasi	-	-	-	-	2	7	1	10
Kelompok fungsional	-	-	5	-	-	-	-	5
JUMLAH	2	1	5	1	9	14	5	37

Grafik





KEGIATAN YANG DILAKUKAN

A. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha merupakan unit kerja yang melakukan tugas untuk mendukung pelaksanaan dalam menyiapkan pengelolaan dan administrasi Pusbindiklat Peneliti. Kegiatan yang sangat menonjol dilakukan pada tahun ini adalah menyiapkan sarana dan prasana fisik, baik gedung dengan kelengkapannya maupun peralatan dan penunjang lainnya. Fungsi inti Pusbindiklat peneliti adalah sebagai pembina peneliti PNS di pusat dan daerah baik dalam peningkatan SDM maupun proses penilaian jabatan fungsionalnya, dengan demikian Bagian Tata Usahanya harus kuat.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan :

Kegiatan	Jumlah	Keterangan
A. PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA		
❖ Belanja Modal Peralatan dan Mesin : - Komputer PC dan Kelengkapannya LCD Projector, PC Laptop dan Kelengkapannya	6 Unit	
B. PEMBANGUNAN PRASARANA		
1. Membuat Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Fisik yang meliputi : - Pembangunan Jalan dan Parkir - Pembangunan Gedung Administrasi - Penyelesaian Gedung Asrama I (lanjutan)	1 Paket 1 Paket 1 Paket	Lokasi di Cibinong <i>Science Center</i>
2. Membuat Rencana Anggaran Biaya tambahan : - Pengadaan Meubelair	1 Paket	
3. Membuat Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Prasarana Gedung : • Penyambungan Listrik • Deep well (Sumur Dalam) • AC Split 9 Unit 1.5 PK	1 Paket 1 Paket 1 Paket	
C. Urusan Kepegawaian : Memproses :		
• Usul kenaikan Pangkat Pejabat Struktural	4 orang	Pontas Sinaga, Betty Riyadini, Bawono Mulyono, Akhmad Chodiq Elli, Yopih, Morrrys, Fatimah
• Usul Kenaikan Pangkat Reguler	4 orang	



LIPI

<ul style="list-style-type: none">• Kenaikan Gaji Berkala	2 Orang	Dodi Rosadi dan Citra
<ul style="list-style-type: none">• Usulan Pensiun	3 orang	Mardi, Koeswadi, Masri B.
<ul style="list-style-type: none">• Usul impassing Jabatan Fungsional Pranata Humas	9 orang	Kosasih, Zaenal, Citra, Dodi Rosadi, Rahmat Ali, Nasrul, Hartono, Suyatman, Ika Susanti
<ul style="list-style-type: none">• Usul impassing Jabatan Fungsional Arsiparis	1 orang	Zarnita
<ul style="list-style-type: none">• Usulan Formasi Pusbindiklat		
<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan DUK Pusbin• Usulan Calon Diklat Analisis Kepegawaian	1 orang	Suparsi
<ul style="list-style-type: none">• Usulan Calon Peserta Diklat Bendaharawan Pengeluaran	1 orang	Suparsi
<ul style="list-style-type: none">• Usulan Calon Peserta Diklat Barang dan Jasa	1 orang	Erwin
<ul style="list-style-type: none">• Proses Usulan Cuti PNS Pusbin	15 orang	
<ul style="list-style-type: none">• Usulan General Chek Up CPNS Pusbin	3 orang	Yuni, Anisah, Ira

B. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan

Bidang ini merupakan unit yang melakukan penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pengembangan program, pendidikan dan pelatihan. Kegiatan lainnya adalah melakukan pengkajian serta evaluasi program, pembinaan, maupun kegiatan yang telah dilakukan bagi Bidang yang lain seperti Bidang Penyelenggaraan Diklat maupun Bidang Penilaian dan Akreditasi Jabatan Fungsional Peneliti. Disamping itu bidang ini menyiapkan perangkat/dasar hukum maupun aturan yang terkait dengan pembinaan peneliti dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Metode yang dilakukan pada umumnya melalui diskusi, pertemuan tim, seminar terbatas maupun *outsourshing* pakar dari luar instansi LIPI. Beberapa program yang telah diselesaikan dan dalam tahun 2005 oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan, antara lain :

1. Penyusunan Modul Diklat Fungsional Peneliti.

Pada tahun 2005 telah terselesaikan 6 buah modul mata diklat, terdiri dari:

- Rancangan Penelitian Bidang IPS.
- Sumber Koleksi Data bidang IPS.
- Pengolahan & Analisis Data Bidang IPS.
- Sumber & Koleksi Data Bidang IPA/IPT
- Pengolahan & Analisis Data Bidang IPA/IPT.
- Pembinaan Karir PNS Peneliti dan Etika Peneliti (masih dalam proses penyelesaian).
- Serta melakukan revisi format maupun substansi pada modul – modul yang telah diselesaikan pada tahun 2003 dan 2004.

2. Penerbitan Jurnal Ilmiah.

Pada tahun 2005 telah 2 kali menerbitkan jurnal ilmiah “Widya Riset” volume 8 No 1 dan 2, masing-masing 200 eksemplar.

Jurnal ini diutamakan untuk menerbitkan karya tulis lulusan Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama. Hal ini dilakukan untuk memotivasi peserta agar dapat mengembangkan kemampuan dalam menulis karya tulis ilmiah.

3. Akreditasi Diklat Fungsional Peneliti.

Pada tahun 2005 diusulkan 7 jenis diklat yaitu Diklat Kepemimpinan, Pelatihan Prajabatan Golongan III, II, dan I serta Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama, dan Diklat Pengolahan Data dan Metode Penelitian untuk di akreditasi oleh LAN. Hasil yang dicapai, sesuai dengan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 958/I/10/8/2005 tentang penetapan akreditasi & sertifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan PNS tanggal 14 Desember 2005 dan sertifikat No 967/I/13/14/2005, Pusbindiklat Peneliti LIPI telah diberikan sertifikat pelaksanaan diklat-diklat sebagai berikut :

- Diklat Kepemimpinan Tk. III
- Diklat Kepemimpinan Tk. IV
- Pelatihan Prajabatan Gol. III
- Pelatihan Prajabatan Gol. II

- Pelatihan Prajabatan Gol. I
- Sedangkan untuk program & pelaksanaan Diklat Fungsional Peneliti Tk. I dan Diklat Teknis lainnya masih dalam proses pengujian.

4. Penyusunan Panduan Penyelenggaraan Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan.

Penyusunan Panduan ini dimulai dengan menyusun kompetensi dasar-dasar yang dibutuhkan bagi peserta diklat. Setelah itu disusunlah Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)

Dalam tahun 2005 penyusunan panduan ini Tim telah menyelesaikan Draft Matriks GBPP dan Konsep Panduan Penyelenggaraan Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan. Rencana penyelesaian hal ini akan dilakukan pada tahun 2006

5. Penyusunan Juknis tentang Penilaian Angka Kredit Peneliti.

Petunjuk Teknis yang disusun merupakan pejabaran operasionalisasi dari petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya yang diputuskan oleh kepala LIPI dan Kepala BKN nomor 3719/D/2004 dan nomor 60 tahun 2004. Hasil yang dicapai, yaitu keluarnya Peraturan Kepala LIPI No. 02/E/2005 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Fungsional Peneliti tanggal 29 Juli 2005.

6. Penyusunan Rancangan Keppres tentang Tunjangan Jabatan Peneliti.

Penyusun rancangan ini merupakan usulan kenaikan tunjangan bagi pejabat peneliti yang dimaksudkan untuk memotivasi agar kinerja peneliti meningkat, seiring dengan keluarnya peraturan yang baru. Peraturan ini lebih memfokuskan pada peningkatan mutu sehingga penilaian-penilaian angka kreditnya lebih ketat. Hasil yang dicapai, yaitu Keluarnya Keppres RI No. 58 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti. Proses pengusulan tunjangan tersebut di operasionalkan oleh BKN dengan mengeluarkan Keputusan Kepala BKN No. 29 Tahun 2005 tanggal 19 April 2005 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti.



7. Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah.

Pedoman ini dibutuhkan agar jurnal/ majalah ilmiah yang terbit dilingkungan lembaga penelitian & pengembangan mempunyai standarisasi. Dalam menyusun pedoman ini tim perumus terdiri dari perwakilan – perwakilan instansi yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kantor Kementerian Pendayagunaan Negara (MenPan), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Departemen Keuangan (DepKeu), dan Sekretariat Negara. Adapun hasil yang dicapai pada tahun 2005 adalah dikeluarkannya Peraturan Kepala LIPI No. 01/E/2005 pada tanggal 26 Juli 2005 tentang Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah.

8. Penyusunan Etika Peneliti.

Tim perumus Kode Etik Jabatan Fungsional Peneliti terdiri dari pejabat – pejabat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ada pun hasil yang dicapai baru sampai pada tahap perumusan Draft/Konsep Etika Peneliti Indonesia. Hal ini dikarenakan ada aturan yang dapat mengeluarkan pedoman kode etik adalah asosiasi profesi, sehingga LIPI hanya dapat mendorong terbentuknya asosiasi tersebut.

9. Penyusunan Bidang Kepakaran.

Penyusunan Bidang ini dimaksudkan agar peneliti lebih fokus/spesifik dalam memilih atau melakukan penelitian. Pemilihan bidang kepakaran/penelitian ini terkait dengan bidang penelitian tugas & fungsi lembaga tersebut. Tim perumus Bidang Kepakaran terdiri dari perwakilan pejabat instansi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Departemen Kesehatan (DepKes). Hasil yang dicapai adalah dikeluarkannya Peraturan Kepala LIPI No. 03/E/2005 pada tanggal 29 Juli 2005 tentang Pedoman Pemilihan/Penentuan Bidang Penelitian dan atau Kepakaran Peneliti.

10. Penggadaan Buku Pedoman P2JP Nasional.

Penggandaan buku pedoman P2JP Nasional, yang dimaksud adalah memperbanyak petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional peneliti dan angka kreditnya yang dituangkan berdasarkan keputusan bersama kepala Lembaga



LIPI

Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 3719/D/2004 dan Nomor : 60 Tahun 2004 sebanyak 600 eksemplar

11. Sosialisasi/Pemaparan Peraturan Baru P2JP Nasional.

Sosialisasi/Pemaparan peraturan baru P2JP Nasional, dilakukan serentak sebanyak 2 kali pada bulan September dan November 2005. Dalam Sosialisasi/pemaparan ini di undang seluruh litbang LPND, departemen dan Pemda.

Bidang ini juga berperan aktif dalam penyelenggaraan Pelantikan dan Pengukuhan gelar Profesor Riset pada tanggal 5 Januari 2006. Dalam Sosialisasi/pemaparan ini dengan mengundang seluruh litbang LPND, Departemen dan Pemda.

C. Bidang Penilaian Dan Akreditasi

1. Penilaian Angka Kredit Peneliti Nasional

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bidang penilaian dan akreditasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan proses penilaian angka kredit terhadap usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional peneliti dari Departemen/Non Departemen maupun LPND dari seluruh Indonesia. Dalam perencanaannya P2JP Nasional menyelenggarakan penilaian angka kredit setiap bulan sekali. Pada tahun 2005 ini peraturan baru mengenai jabatan fungsional peneliti pertama diluncurkan pada akhir bulan September, sehingga Panitia Penilai Jabatan Peneliti Nasional memutuskan untuk menuntaskan seluruh usulan penilaian angka kredit yang diterima Sekretariat P2JP Nasional sampai dengan 31 Oktober 2005 dengan menggunakan peraturan jabatan fungsional peneliti yang lama.

Berikut ini data penilaian angka kredit peneliti nasional yang telah dilaksanakan Bidang Penilaian dan Akreditasi :



LIPI

Tabel. 3.1. Rekapitulasi Penilaian Angka Kredit Peneliti Nasional

No	Bulan	Usul Penilaian			Σ berkas	Hasil sidang					Σ peneliti
		Baru	Naik	TAK		MS	Sah	Baru	P III	TMS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Januari	26	321	44	391	83	41	59	33	42	258
2.	Februari	6	65	24	95	46	16	16	30	33	141
3.	Maret	8	207	41	256	145	27	29	69	38	308
4.	April	11	174	31	216	94	21	40	47	30	232
5.	Mei	17	239	30	286	143	0	61	41	32	277
6.	Juni	16	204	37	257	109	0	54	21	30	214
7.	Juli	29	189	36	254	87	26	79	30	26	248
8.	Agustus	15	290	35	340	91	42	42	93	30	298
9.	September	18	178	18	214	121	12	24	29	39	225
10.	Oktober	30	453	38	521	149	78	50	60	34	371
11.	November	122	538	32	692	207	57	117	56	40	477
12.	Desember	0	0	79	79	424	0	60	99	83	666
		298	2858	445	3601	1699	320	631	608	457	3715

2. Penetapan Angka Kredit Peneliti Nasional

Dari hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional peneliti yang telah dilakukan oleh Panitia Penilai Jabatan Peneliti Nasional, usulan yang memenuhi persyaratan untuk naik jabatan ataupun *maintenance* bagi yang sudah mencapai jabatan Ahli Peneliti utama, serta pengesahan hasil penilaian Panitia Penilai Jabatan Peneliti Instansi yang telah diberi kewenangan penilaian sampai jabatan tertentu segera dibuatkan Penetapan Angka kredit yang ditanda tangani oleh Kepala LIPI. Berikut ini jumlah Penetapan Angka kredit yang telah diselesaikan oleh Sekretariat P2JP Nasional berdasarkan instansinya.



Tabel. 3.2. Rekapitulasi Jumlah PAK yang dikeluarkan LIPI

No	Instansi	BULAN												Σ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Dep. Kop & UKM	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Depbudpar	7	15	3	11	4	17	18	15	2	0	2		
3.	Depkominfo	1	7	0	1	1	5	2	2	3	1	0		
4.	Depdagri	2	3	6	3	2	0	3	4	3	7	3		
5.	Depkum dan HAM	3	0	0	0	0	0	1	2	2	2	4		
6.	Depkeu	0	1	0	2	1	0	0	3	9	3	1		
7.	Deptan	49	48	16	61	37	57	25	49	52	47	103		
8.	Dep. Perind	3	3	2	3	1	2	2	2	0	3	2		
9.	Dep. Perdag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Dep. ESDM	2	4	2	11	6	6	4	4	7	4	1		
11.	Dephub	3	3	4	4	4	2	1	4	2	2	9		
12.	Depdiknas	4	1	2	1	4	6	4	3	10	3	4		
13.	Depkes	3	14	7	11	7	3	29	16	13	1	4		
14.	Depag	0	2	2	4	0	3	2	0	3	3	1		
15.	Depnakertrans	0	1	0	1	0	0	1	0	1	2	0		
16.	Depsos	1	3	1	1	3	4	0	0	1	3	0		
17.	Depkehut	4	15	1	5	14	9	6	8	2	19	16		
18.	DKP	2	3	1	6	9	8	8	5	7	11	12		
19.	Dep. PU	0	3	5	8	7	1	1	2	4	3	2		
20.	Kejagung	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
21.	Setjen DPR	1	6	0	0	1	2	0	0	0	1	0		
22.	LAN	0	3	1	0	0	1	0	1	1	1	3		
23.	LAPAN	1	4	2	11	4	10	4	6	4	11	10		
24.	LIPI	21	15	28	29	21	35	30	39	28	34	49		
25.	BATAN	11	18	9	21	19	15	13	9	17	10	23		
26.	BPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27.	ARNAS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
28.	Bakosurtanal	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1		
29.	BKKBN	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1		
30.	BPPT	5	8	4	11	29	13	19	18	16	4	25		
31.	BPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
32.	BSN	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0		
33.	BMG	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0		
34.	Bapeten	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		124	184	98	209	176	204	175	193	189	178	276		



LIPI

3. Pengolahan Data Peneliti Nasional

Tabel. 3.3. Rekapitulasi Jumlah Peneliti di Indonesia

No	Instansi	Σ	Tingkat Jabatan								
			Aspenda	Aspendya	Ajpenda	Ajpendya	Penda	Pendya	Ahpenda	Ahpendya	APU
1.	Dep. Kop & UKM	51	9	5	5	5	10	7	7	0	3
2.	Depbudpar	27	6	9	5	3	1	1	0	1	1
3.	Depkominfo	16	7	1	2	1	2	3	2	0	0
4.	Depdagri	236	38	13	14	13	56	56	28	9	9
5.	Depkum dan HAM	54	8	8	11	6	7	7	3	2	2
6.	Depkeu	51	16	8	10	5	4	5	2	0	1
7.	Deptan	188 2	200	184	281	263	318	225	137	88	186
8.	Dep. Perindustrian	415	58	70	93	78	73	28	8	6	1
9.	Dep. ESDM	211	20	18	21	28	45	36	19	7	17
10.	Dephub	133	42	24	23	17	12	6	4	1	4
11.	Depdiknas	497	105	96	111	76	49	35	10	7	8
12.	Depkes	321	40	53	41	37	60	35	23	25	7
13.	Depag	139	4	13	14	13	29	19	19	10	18
14.	Depnakertrans	89	12	5	11	13	19	16	5	5	3
15.	Depsos	115	19	20	27	22	14	8	3	0	2
16.	Depkehut	392	61	39	57	50	72	39	30	15	29
17.	DKP	113	18	10	17	13	19	15	8	0	13
18.	Dep. PU	196	20	12	37	24	42	25	16	7	13
19.	Kejagung	47	4	4	9	6	9	8	5	0	2
20.	Setjen DPR	42	1	5	15	12	7	0	0	1	1
21.	BPK	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0
22.	LAN	49	16	6	13	6	3	2	1	1	1
23.	LAPAN	346	47	57	86	37	38	41	18	9	13
24.	LIPI	103 1	111	88	128	155	205	116	89	36	103
25.	BATAN	512	16	17	70	106	96	65	44	32	66
26.	BPS	36	8	8	12	4	4	0	0	0	0
27.	ARNAS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
28.	Bakosurtanal	55	6	8	9	13	10	3	4	1	1
29.	BKKBN	56	16	5	11	10	11	2	0	1	0
30.	BPPT	582	76	52	109	102	103	61	32	20	27
31.	BPN	15	0	1	6	5	1	1	1	0	0
32.	BULOG	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0
33.	BSN	22	9	3	2	2	3	3	1	0	1
34.	BMG	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0
		774 5	999	848	1250	1125	1322	869	519	285	532

Proses pengolahan data Peneliti Nasional ini dilakukan dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Transfer data peneliti dari program database berbasis microsoft excel kedalam database berbasis microsoft access
- b. Melakukan kompilasi data peneliti per departemen
- c. Melakukan cek ulang terhadap umur peneliti (berkaitan dengan masa pensiun peneliti)
- d. Melakukan cek ulang terhadap tmt jabatan terakhir
- e. Melakukan cek ulang terhadap *double* data

Permasalahan/kendala yang dihadapi :

- a. Banyaknya *double* data, dari nama maupun NIP yang selama ini tidak terdeteksi
- b. Adanya beberapa perubahan struktur organisasi departemen/LPND sehingga data yang ada menjadi tidak akurat (belum sesuai dengan kondisi terakhir)
- c. Data yang diperoleh belum dicek ulang dengan data terakhir yang dimiliki masing-masing instansi (untuk memudahkan pembaruan data, menunggu hasil impassing jabatan peneliti)
- d. Ada beberapa data peneliti yang masih kosong

4. Pelaksanaan Impassing Perubahan Nomenklatur Jabatan Peneliti Nasional

Pelaksanaan perubahan nomenklatur jabatan peneliti dilakukan secara bersama-sama antara LIPI dalam hal ini sekretariat P2JP Nasional dengan instansi masing-masing melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Sosialisasi pembuatan Penetapan Angka Kredit Peneliti Impassing
- b. Sosialisasi pemilihan bidang kepakaran peneliti
- c. Penghitungan angka kredit peneliti berdasarkan peraturan baru
- d. Pengecekan data peneliti (nama, Nip, karpeg, tempat tanggal lahir, jabatan lama, pendidikan, bidang kepakaran, pangkat dan golongan, jabatan baru)
- e. Penandatanganan Penetapan Angka Kredit Peneliti Impassing



Sampai dengan Desember 2005, pelaksanaan pembuatan impassing masih terus berjalan dalam tahap perbaikan hasil pengecekan data.

5. Sosialisasi pedoman jabatan fungsional peneliti

Tabel. 3.4. Rekapitulasi Sosialisasi Pedoman Jabatan Fungsional Peneliti

No	Instansi	Keterangan
1.	Departemen Perindustrian (Jakarta, Makasar, Jogjakarta)	3 kali
2.	Departemen Agama	1 kali
3.	BKKBN	2 kali
4.	Setjen DPR	2 kali
5.	Departemen ESDM	2 kali
6.	Departemen PU	1 kali
7.	Departemen Komunikasi dan Informatika	2 kali
8.	Departemen Perhubungan	1 kali
9.	Departemen Pendidikan Nasional	1 kali
10.	BATAN	1 kali
11.	LAPAN	1 kali
12.	LIPI (Serpong, Jakarta)	3 kali
13.	Departemen Dalam Negeri	1 kali
14.	Departemen Kelautan dan Perikanan	2 kali
15.	Departemen Pertanian (Bogor)	1 kali
	Jumlah	24 kali

6. Pengukuhan APU tahun 2005

Tabel. 3.5. Rekapitulasi Pengukuhan APU Tahun 2005

NO	Instansi	Jumlah Pengukuhan	Bulan	Jumlah APU
1.	BPPT	1 kali	Mei	3 orang
2.	Departemen Pertanian	2 kali	Maret, Agustus	6 orang
3.	Departemen Kehutanan	1 kali	Agustus	2 orang
4.	Departemen Pekerjaan Umum	2 kali	Juli, Agustus	4 orang
5.	Departemen Kelautan dan Perikanan	1 kali	September	3 orang
6.	Departemen ESDM	2 kali	Juli	5 orang
7.	LIPI	4 kali	Juni, Agustus, September (2)	10 orang
		13 kali		33 orang

7. Pelantikan Profesor Riset Tahun 2005 (yang dilaksanakan 5 Januari 2006)

Pelantikan Profesor Riset secara nasional merupakan salah satu program kegiatan tahun 2005 yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 5 Januari 2006, bertempat di Dhanapala Gedung D Departemen Keuangan, Jl. Senen Raya No. 6 Jakarta Pusat. Peserta pelantikan ini merupakan hasil seleksi dari Ahli Peneliti Utama yang telah dikukuhkan atau yang telah meraih gelar APU sebelum tahun 1989. Berikut ini rekapitulasi Ahli Peneliti Utama yang telah dilantik menjadi Profesor Riset.

Tabel. 3.6. Rekapitulasi Profesor Riset di Indonesia

No	Instansi	Jumlah yang dilantik
1.	BATAN	18 orang
2.	BPPT	17 orang
3.	BMG	1 orang
4.	Departemen Pertanian	28 orang
5.	Departemen Kehutanan	9 orang
6.	Departemen Agama	5 orang
7.	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	5 orang
8.	Departemen Kelautan dan Perikanan	6 orang
9.	Departemen Pekerjaan Umum	7 orang
10.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	44 orang
11.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	7 orang
		148 orang



LIPI

D. Bidang Penyelenggaraan Diklat

Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan pada tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti dimaksudkan untuk memberi bekal bagi PNS yang memilih jalur pengembangan karir peneliti, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas penelitian dapat dilakukan secara profesional. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti ini diperuntukkan bagi para peneliti yang pelaksanaannya sebanyak sebanyak 6 kali/angkatan secara nasional pada tahun 2005.

Tabel Pelaksanaan

Nama Diklat	Peserta		Penyelenggaraan		Asal Dana
	Jumlah	Instansi Asal	Tempat	Waktu	
DFP Tk. I Angkatan XII	30 orang	LIPI	PMPDMP, Ciawi - Bogor	31 Maret s.d. 20 April 2005	DIPA
DFP Tk. I Angkatan XIII	30 orang	Non LIPI	PMPDMP, Ciawi - Bogor	27 Juni s.d. 16 Juli 2005	Instansi Peserta
DFP Tk. I Angkatan XIV	42 orang	Non LIPI	Pusdiklat Pegawai Dep. KOMINFO	7 s.d. 26 September 2005	Instansi Peserta
DFP Tk. I Angkatan XV	29 orang	LIPI	Wisma Aryanti, Cisarua - Bogor	15 November s.d. 6 Desember 2005	DIPA
DFP Tk. I Angkatan XVI	30 orang	Non LIPI	Pusdiklat Tekmira, DESDM - Bandung	21 November s.d 17 Desember 2005	Instansi Peserta
DFP Tk. I Angkatan XVII	31 orang	Non LIPI	Pusdiklat Graha Insan Cita - Depok	1 s.d. 21 Desember 2005	Instansi Peserta

2. Diklat Prajabatan Golongan II dan III

Diklat Prajabatan Golongan II dan III merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi PNS Golongan II dan III. Diklat ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya



LIPI

organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Diklat Prajabatan Golongan II dan III bertempat di Pusdiklat Graha Insan Cita – Depok. Diklat ini diselenggarakan dalam dua angkatan yang masing-masing angkatan dilaksanakan pada :

Angkatan I : 13 s.d 25 Mei 2005

Angkatan II : 25 Mei s.d. 7 Juni 2005

Peserta adalah CPNS LIPI yang berjumlah 276 orang. Daftar nama peserta terlampir.

3. Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Diklat Kepemimpinan Tingkat III merupakan salah satu diklat yang diperlukan dalam pembentukan kompetensi jabatan struktural Eselon III. Diklatpim Tingkat III Angkatan IV telah diselenggarakan pada tanggal 25 Mei s.d 1 Juli 2005 dan bertempat di Kompleks Surya – PMPDMP Departemen Pertanian, Ciawi – Bogor. Diklat ini diikuti oleh 21 orang peserta yang terdiri dari 6 orang dari lingkungan Sektama LIPI yang dibiayai oleh dana DIPA Kantor Pusat LIPI (Biro Umum dan Perlengkapan LIPI); 13 orang dari berbagai unit kerja di lingkungan LIPI, 1 orang dari BPN, dan 1 orang dari Kejaksaan Tinggi Jakarta Timur. Biaya masing-masing peserta ini berasal dari unit kerja asal peserta. Daftar nama peserta terlampir .

4. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV merupakan salah satu diklat yang diperlukan dalam pembentukan kompetensi jabatan struktural Eselon Tingkat IV. Diklatpim Tingkat IV Angkatan III telah diselenggarakan pada tanggal 20 April s.d. 20 Mei 2005 bertempat di Kompleks Tirta – PMPDMP Departemen Pertanian, Ciawi – Bogor. Diklatpim Tingkat IV Angkatan III ini diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari 14 orang dari lingkungan Sektama LIPI yang dibiayai oleh Dana DIPA Kantor Pusat LIPI (Biro Umum dan Perlengkapan LIPI); 18 orang dari berbagai unit kerja di lingkungan LIPI, 6 orang dari BPHN, dan 2 orang dari BPN Jakarta Pusat. Masing-masing peserta dibiayai oleh unit kerja asal peserta. Daftar nama peserta terlampir .

5. Diklat Bendahara Penerimaan

Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bendahara Penerimaan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, setiap PNS yang akan menduduki jabatan atau mendapat tugas sebagai Bendahara Penerimaan diharapkan mengikuti diklat ini.

Diklat Bendahara Penerimaan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 15 September 2005 bertempat di Pusdiklat Graha Insan Cita – Depok dan diikuti oleh 22 orang peserta yang berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan LIPI. Daftar nama peserta terlampir. Penyelenggaraan diklat ini dibiayai oleh Dana DIPA LIPI Tahun Anggaran 2005.

6. Diklat Pengelolaan APBN

Penyelenggaraan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Pengelola Anggaran didasari oleh adanya kebutuhan tenaga pengelola keuangan negara, khususnya dalam mengelola APBN. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola keuangan sehingga mampu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diklat Pengelolaan APBN diselenggarakan pada tanggal 12 s.d. 27 September dan bertempat di Pusdiklat Graha Insan Cita – Depok. Diklat ini diikuti oleh 25 orang yang berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan LIPI. Daftar nama peserta terlampir. Pendidikan dan pelatihan ini dibiayai oleh Dana DIPA LIPI Tahun Anggaran 2005.

7. Diklat Bendahara Pengeluaran

Penyelenggaraan DTSS Bendahara Pengeluaran didasari oleh adanya kebutuhan tenaga pengelola keuangan negara, khususnya Bendahara Pengeluaran, yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik dalam melaksanakan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran/belanja negara, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya diklat tersebut diharapkan calon bendahara atau bendahara mampu untuk



LIPI

mengelola pengeluaran/belanja negara di unit kerja masing-masing sesuai dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku (*up to date*).

Diklat Bendahara Pengeluaran diselenggarakan pada tanggal 8 s.d 19 Agustus 2005 dan bertempat di Graha Insan Cita – Depok. Diklat ini diikuti oleh 25 orang peserta yang berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan LIPI. Daftar nama peserta terlampir. Pendidikan dan pelatihan ini dibayai oleh Dana DIPA LIPI Tahun Anggaran 2005.

8. Diklat Arsiparis

Penyelenggaraan Diklat Arsiparis didasari oleh adanya kebutuhan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan arsip, sehingga dipandang perlu melakukan penataan arsip sesuai dengan metode pengarsipan yang benar dan efisien melalui penyusunan berkas yang dapat juga disimpan dalam media elektronik.

Diklat Arsiparis bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan arsip, yang meliputi ketatalaksanaan kearsipan, pembuatan petunjuk Kearsipan, pengolahan arsip, penyimpanan arsip, konservasi arsip, layanan Kearsipan, dan publikasi arsip dan terciptanya Arsiparis Tingkat Keterampilan yang berkualitas dari segi penguasaan wawasan materi ajaran sesuai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh Arsiparis serta memenuhi ketentuan secara nasional dan internasional.

Diklat Arsiparis diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus s.d. 8 September 2005 bertempat di Wisma Aryanti, Cisarua – Bogor. Diklat ini diikuti oleh 20 orang peserta yang berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan LIPI. Daftar nama peserta terlampir. Penyelenggaraan diklat ini dibiayai oleh Dana DIPA LIPI Tahun Anggaran 2005.

9. Diklat Metode Penelitian dan Pengolahan Data

Kelangkaan Sumber Daya manusia yang andal dan profesional dalam pelaksanaan riset merupakan suatu tantangan yang harus dicarikan solusinya. Salah satu kelemahan yang menonjol adalah pada teknik analisis dan pengolahan data. Memperhatikan hal tersebut, maka pembekalan keahlian bagi pengolah dan penganalisa data perlu ditingkatkan melalui suatu pendidikan dan pelatihan.

Memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan tersebut, LIPI mengupayakan pelaksanaan Diklat Metode Penelitian dan Pengolahan Data



LIPI

Angkatan VII yang ditujukan pada para pengolah data terutama pada bidang ilmu sosial di lingkungan LIPI.

Diklat Metode Penelitian dan Pengolahan Data diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 29 September 2005 bertempat di Wisma Aryanti, Cisarua – Bogor. Diklat ini diikuti oleh 25 orang peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan LIPI. Daftar nama peserta terlampir. Penyelenggaraan diklat ini dibiayai oleh Dana DIPA LIPI Tahun Anggaran 2005.

10. Diklat Analis Kepegawaian

Diklat Analis Kepegawaian merupakan diklat jabatan fungsional yang diperuntukkan bagi Pejabat Kepegawaian dengan tujuan agar mampu mengelola administrasi kepegawaian secara profesional. Selain itu diklat ini juga dapat memberikan keterampilan dan atau pengetahuan teknis pengelola Analis Kepegawaian bagi pegawai negeri sipil, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

Diklat Analis Kepegawaian diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 22 Juli 2005 bertempat di Kompleks Surya – PMPSDMP Departemen Pertanian, Ciawi – Bogor. Diklat ini diikuti oleh 30 orang peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan LIPI dan dibiayai oleh Dana DIPA LIPI Tahun Anggaran 2005. Daftar nama peserta terlampir.

11. Diklat Aplikasi Komputer (Web Design)

Pendidikan dan pelatihan Aplikasi Komputer (*Web Design*) ditujukan bagi para pegawai yang ingin belajar tentang teknik mengembangkan situs web. Hal ini sangat penting mengingat visi LIPI untuk menjadi lembaga ilmu pengetahuan bertaraf internasional yang menuntut para pegawainya untuk mampu menguasai internet, termasuk cara membuat dan mengembangkan *web site*.

Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan agar peserta mampu untuk memahami konsep dasar internet/intranet serta mengoperasikan internet; merancang dan membuat *home page*; mengintegrasikan grafik, *hyperlink*, database, dan komponen lainnya; dan membuat *Input – Form* dan *Web Editor*.

Diklat ini diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 16 Desember 2005 bertempat di Pusdiklat Graha Insan Cita – Bogor dan diikuti oleh 20 orang peserta



LIPI

dari berbagai unit kerja di lingkungan LIPI. Daftar nama terlampir. Diklat ini dibiayai oleh Dana DIPA LIPI Tahun Anggaran 2005.

12. Diklat Perancang Perundang-undangan

Untuk menjembatani jarak antara pengalaman dan kemampuan dalam bidang hukum terutama tentang perancangan perundang-undangan diperlukan pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu memperluas wawasan hukum dan melatih pola berpikir secara kritis. Pendidikan dan pelatihan ini ditujukan bagi para pegawai yang ingin memperluas wawasan di bidang perundang-undangan dengan tujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang perundang-undangan.

Diklat Perancang Perundang-undangan diselenggarakan pada tanggal 28 November s.d. 1 Desember 2005 bertempat di Wisma Aryanti, Cisarua – Bogor. Diklat ini diikuti oleh 20 orang peserta yang berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan LIPI. Daftar nama peserta terlampir. Penyelenggaraan diklat dibiayai oleh Dana DIPA LIPI Tahun Anggaran 2005.

13. Diklat Substantif Fungsional Perencana (Pemantauan dan Evaluasi)

Semakin terbukanya ekonomi serta gencarnya gelombang gerakan demokratisasi telah meningkatkan kesadaran dan daya kritis masyarakat, diantaranya terhadap kinerja pemerintah dalam pembangunan. Sumber daya yang semakin langka dan keterpurukan sosial ekonomi sebagian besar masyarakat kita mengharuskan kita untuk lebih berhati-hati dalam perencanaan pembangunan. Perubahan tersebut menuntut SDM atau aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesional di bidang perencanaan, tidak hanya dalam pembuatan rencana, melainkan juga dalam hal pemantauan dan evaluasi kinerja program dan proyek.

Atas dasar hal tersebut diperlukan program pendidikan perencana di lingkungan LIPI yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, khususnya mengenai monitoring dan evaluasi kinerja program dan proyek, agar kinerja pembangunan khususnya tingkatan proyek menjadi lebih optimal. Mengingat pentingnya kegiatan pemantauan dan evaluasi di dalam suatu program dan proyek, maka diadakan diklat yang khusus membahas permasalahan ini secara detail.



LIPI

Diklat ini bertujuan meningkatkan kemampuan para perencana, pengawas dan evaluator agar proses pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih baik, dan juga untuk menghindari inefisiensi dalam penggunaan sumber daya yang semakin langka.

Diklat Pemantauan dan Evaluasi diselenggarakan pada tanggal 28 November s.d. 9 Desember 2005 bertempat di Gedung PDII LIPI – Jakarta Selatan. Diklat ini diikuti oleh 18 orang perencana di lingkungan LIPI yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Daftar nama peserta terlampir. Penyelenggaraan diklat dibiayai oleh Dana DIPA LIPI Tahun Anggaran 2005.

14. Kursus Bahasa Inggris (GECC)

Kursus Bahasa Inggris dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris pegawai LIPI dalam rangka ikut mewujudkan visi LIPI sebagai Lembaga ilmu pengetahuan yang ber-standar internasional. Kursus ini diselenggarakan 2 kali seminggu dan dibagi menjadi 2 kelas dengan jumlah peserta masing-masing 11 orang (Kelas A) dan 12 orang (Kelas B). Evaluasi dilaksanakan pada tahap akhir pembelajaran untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan peserta. Daftar nama peserta terlampir.

15. Ujian Penyetaraan Ijazah (PI) Tingkat SLTA dan S1

Penyelenggaraan ujian Penyetaraan Ijazah tahun 2005 diikuti oleh 26 orang peserta untuk Ujian Penyetaraan Ijazah Tingkat S1 dan 1 orang peserta untuk Tingkat SLTA. Ujian diselenggarakan pada tanggal 9 September 2005 bertempat di gedung PDII LIPI Jakarta Selatan. Daftar nama peserta terlampir

ANGGARAN BELANJA

Pusbindiklat Peneliti LIPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya, untuk melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2005, didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Belanja Rutin (BUP) sebesar Rp. 258.000.000,- dan DIPA Anggaran Belanja Pusbindiklat sebesar Rp. 2.706.013.000,-. Anggaran ini dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan bahan, perjalanan dinas pegawai, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai, penyusunan modul, penerbitan jurnal ilmiah, akreditasi diklat Fungsional Peneliti, penyusunan panduan, pembinaan dan pengembangan kompetensi pejabat fungsional Departemen/LPND, dan pengembangan dan pengelolaan informasi.

Penyediaan anggaran sebagaimana tersebut di atas dialokasikan dan digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Bidang Penyelenggaraan Diklat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Penilaian dan Akreditasi, dan Bagian Tata Usaha Pusbindiklat Peneliti LIPI.

Alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masing – masing Bidang dan Bagian Tata Usaha Pusbindiklat Peneliti LIPI. (daftar anggaran terlampir)

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan substansial antara lain :
 - a. Menyangkut legitimasi peraturan baru tentang peneliti sudah mulai dilakukan (Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya).
 - b. Petunjuk Teknis tentang Pedoman Akreditasi Majalah, Bidang Kepekaran, dan Pengukuhan APU sebagai Profesor Riset.
Merupakan upaya awal untuk membenahi sisi hulu dari jabatan peneliti. Dengan membenahan kualitas sisi hulu maka sisi hilir akan secara otomatis kualitasnya dapat terjaga dengan baik.
2. Penyelesaian modul-modul Diklat fungsional peneliti tingkat dasar dan lanjutan juga merupakan langkah awal dari membenahan jabatan fungsional peneliti pada sisi hulu, agar peneliti siap dan mampu secara profesional dalam menjalankan tugasnya.
3. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan teknis substantif antara lain: Bendahara penerimaan, pengelolaan APBN, Bendahara pengeluaran, serta pendidikan dan pelatihan barang dan jasa (Kerjasama dengan inspektorat) merupakan langkah antisipatif Pusbindiklat dalam menyambut peraturan-peraturan baru dalam pengelolaan DIPA/APBN pada tahun 2006 yang sarat dengan perubahan.
4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis substantif yang lain seperti Arsiparis, Kepegawaian, Aplikasi komputer, Perundang-undangan, Perencana, dan lain-lain merupakan pendidikan dan pelatihan teknis merupakan kegiatan terakhir dikelola langsung oleh Pusbindiklat Peneliti. Untuk tahun-tahun yang akan datang Pusbindiklat hanya sebagai pelaksananya, sedangkan perencanaan dan pengembangannya akan dikelola oleh unit lain



LIPI

5. Pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan peneliti akan lebih terfokus pada penilaian jabatan peneliti Madya dan Utama; sedangkan peneliti pertama dan peneliti muda sejauh mungkin diserahkan kepada instansi pusat yang telah memenuhi syarat. Oleh karena itu tahun 2006 kegiatan evaluasi dan akreditasi Tim Penilai Instansi akan lebih diintensifkan.
6. Tugas – tugas tambahan Pusbindiklat Peneliti LIPI sebagai implikasi peraturan baru jabatan fungsional peneliti meliputi:
 - a. Pelaksanaan impassing angka kredit peneliti nasional dari pola lama menjadi pola baru.
 - b. Pelantikan APU menjadi Profesor Riset yang dilaksanakan tanggal 5 Januari 2006 juga merupakan tugas tambahan Pusbindiklat dan LIPI selaku instansi pembina jabatan fungsional peneliti.
 - c. Sosialisasi dan pembimbingan teknis terhadap tim pengelola jabatan fungsional peneliti Departemen/LPND
7. Upaya yang dilakukan agar Pusbindiklat Peneliti LIPI menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi.

B. SARAN KEBIJAKAN

1. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Pusbindiklat Peneliti diatas, sebaiknya penyelesaian pembangunan kompleks Pusbindiklat di kawasan Cibinong *Science Center*, menjadi prioritas utama dari kebijakan LIPI. Terlebih karena adanya kewenangan LIPI untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional peneliti sebagai salah satu syarat menduduki jabatan fungsional peneliti.
2. Pusbindiklat Peneliti LIPI sebagai unit eselon II baru, harus menggambarkan dirinya sebagai unit pembelajaran sehingga kedepan semua penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan akan mengacu pada standar tertentu (ISO, dll).